

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Suatu negara tentunya mempunyai keinginan untuk maju dan berdiri sendiri tanpa tekanan dari negara lain. Meskipun negara tersebut mempunyai masa lalu yang memang diakui oleh dunia bahwa pernah diduduki dan dijalankan oleh negara lain dalam hal militernya. Semakin lama tekanan bagi negara tersebut akan hilang dengan adanya perubahan suatu negara yang akan terus berlangsung seiring dengan munculnya kekuatan baru negara lain serta kemajuan sumber daya manusianya.

Berkaca dari kenyataan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tekanan yang dulu dirasakan oleh suatu negara semakin lama akan hilang seiring munculnya faktor-faktor yang mendukungnya, seperti munculnya kekuatan dan kekuasaan baru dari negara lain, meningkatnya sumberdaya manusia serta keinginan untuk menghapus kesan dari negara yang militernya tertekan dan ingin menunjukkan kepada dunia.

Jepang melakukan sebuah tindakan yang sangat mengejutkan bagi dunia Internasional. Dengan mengeluarkan kebijakan untuk ikut dalam pemberantasan perompak di perairan Somalia, dengan mengirimkan dua kapal perangnya ke perairan Teluk Aden, yang sedang dilanda konflik yaitu perompakan bagi kapal-kapal yang melawati perairan tersebut. Pengiriman kapal angkatan laut Jepang ke perairan Somalia yaitu Teluk Aden merupakan yang pertama dilakukan oleh

Jepang. Pasukan Beladiri Jepang tidak terlibat perang sejak Perang Dunia II walaupun pasukan Jepang berada di Irak untuk membantu pembangunan kembali negara itu.<sup>1</sup> Jepang yang dahulu masih berada dibawah tekanan Amerika Serikat, kini sudah berani mengambil sikap sendiri untuk mengeluarkan kebijakan tanpa menghiraukan AS dalam hal kemiliterannya. Secara garis besar kegiatan militer Jepang diatur oleh konstitusi yang dibuat pasca Perang Dunia II dibawah pengaruh kuat AS.

Melihat fenomena unik inilah yang mendorong penulis tertarik untuk menganalisa lebih jauh mengenai keterlibatan militer Jepang di dunia Internasional dengan dikeluarkannya sebuah kebijakan luar negeri. Permasalahan tersebut penulis rumuskan dalam sebuah judul skripsi yaitu: **Kebijakan Pemerintah Jepang Mengirimkan Kapal Perang Dalam Memberantas Perompak Ke Teluk Aden Somalia Tahun 2009.**

## **B. Tujuan Penelitian**

Suatu penulisan ilmiah bertujuan untuk memberikan gambaran objektif tentang fenomena tertentu yang terjadi. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk : Menganalisa faktor-faktor yang melatar belakangi Jepang dalam keterlibatan pemberantasan perompak di Teluk Aden Somalia.

---

<sup>1</sup> *Jepang Pertimbangkan Kirim Kapal Ke Somalia*, (diksus pada tanggal 17 Mei 2009); <http://www.antara.co.id/arc/2008/12/26/jepang-pertimbangkan-kirim-kapal-perang-ke-somalia>

### **C. Latar Belakang Masalah**

Isu keamanan menjadi sebuah masalah yang banyak menyita perhatian Internasional, terutama di kawasan negara–negara dunia ketiga. Pola hubungan antarbangsa cenderung bergeser ke arah semakin menonjolnya kepentingan ekonomi, sehingga timbul terwujudnya stabilitas kawasan. Kurang optimalnya pengelolaan pulau-pulau terluar dapat menimbulkan berbagai celah terjadinya persoalan sosial, pelanggaran hukum, misalnya, penyelundupan barang dan manusia, terorisme dan lain-lain. Seperti halnya sering beraksinya perompakan di Selat Malaka, yang menyerang kapal-kapal asing yang sering melewati jalur pelayaran tersebut, sebab Selat Malaka adalah salah satu selat terpadat di dunia terutama menuju Asia Timur.

Selain itu isu perompakan tidak hanya terjadi di Selat Malaka, tapi juga terjadi di Perairan Somalia, tepatnya jalur Internasional Teluk Aden, jalur ini merupakan jalur perdagangan yang tak kalah pentingnya bagi perputaran ekonomi global, jalur ini menjadi surga bagi para perompak Somalia. Teluk Aden terletak di Samudra Hindia, antara Yaman di Jazirah Arab bagian selatan dan Somalia di Afrika. Di barat laut berhubungan dengan Laut Merah melalui Selat Bab-el-Mandeb. Teluk ini memiliki banyak variasi ikan, koral dan hewan lainnya karena sedikit polusi.<sup>2</sup> Sehingga pada akhir-akhir ini, Teluk Aden menjadi jalur Internasional yang paling berbahaya bagi setiap kapal yang melewati jalur tersebut. Sebab para perompak tidak segan-segan membunuh para korbanya apabila kemauan mereka tidak dituruti. Para perompak mengoperasikan kapal

---

<sup>2</sup> *Teluk Aden*, (diakses pada tanggal 24 Agustus 2009); [http://id.wikipedia.org/wiki/Teluk\\_Aden](http://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Aden)

berkecepatan tinggi dan dipersenjatai dengan senjata laras panjang, bahkan menahan kapal selama beberapa pekan hingga kapal dibebaskan untuk meminta uang tebusan yang jumlahnya sangat besar yang dibayar oleh pemerintah atau pemilik kapal.

Dengan fakta demikian, ternyata betapa penting dan *urgentya* jalur pelayaran yang melewati Teluk Aden tersebut. Sehingga semua negara yang punya kepentingan disana begitu menaruh perhatian yang sangat besar terhadap keselamatan kapal-kapal yang berlayar di teluk tersebut. Tidak hanya itu telah berkali-kali Resolusi PBB telah dikeluarkan, diantaranya resolusi 1863, 1853, dan 1851, yang pada intinya memperbolehkan negara-negara untuk meredam dan menumpas aksi perompakan Somalia pada teluk Aden.<sup>3</sup> Resolusi-resolusi tersebut dijadikan legitimasi oleh negara-negara yang berkepentingan pada jalur pelayaran tersebut, seperti AS, negara-negara Timur Tengah, Eropa, RRC, dan Korea, serta tidak ketinggalan Jepang yang kemampuan militernya masih di bawah payung militer AS. Sebagaimana telah diamanatkan dalam konstitusi 1947.

Konstitusi tersebut merupakan rancangan AS tahun 1947 atau lebih tepatnya sekitar dua tahun setelah perang dunia II berakhir. Sebagai pihak yang kalah perang Jepang dilarang membangun kekuatan militer dan hanya diperbolehkan membentuk pasukan bela diri.<sup>4</sup> Pemberlakuan konstitusi ini

---

<sup>3</sup> *Filipina Kirim Petugas ke Armada AS*, (diakses pada tanggal 17 Mei 2009); <http://kompas.co.id/read/xml/2009/04/18/16265349/filipina.kirim.petugas.ke.armada.as>, Sabtu, 18 April 2009.

<sup>4</sup> *Konstitusi Jepang (1947)*, (diakses pada tanggal 19 Mei 2009); [http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.html&prev=/translate\\_s%3Fhl%3Did%26q%3Dkonstitusi%2B1947%26tq%3D1947%2BConstitution%26sl%3Did%26tl%3Den](http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://history.hanover.edu/texts/1947con.html&prev=/translate_s%3Fhl%3Did%26q%3Dkonstitusi%2B1947%26tq%3D1947%2BConstitution%26sl%3Did%26tl%3Den)

membuat Jepang ketika itu memiliki kekuatan militer yang agresif berubah menjadi kekuatan militer yang cenderung pasif. Seiring perkembangan waktu telah terjadi perubahan yang besar dalam dinamika politik Internasional. Selama lebih dari setengah abad, sejak Perang Dunia II berakhir, kapasitas Jepang untuk membangun kekuatan militernya dikekang oleh Konstitusi 1947. Konstitusi tersebut dibuat oleh AS sebagai negara pemenang Perang Dunia II, untuk melucuti semua kapasitas militer Jepang yang telah memicu Perang Dunia II. Dengan adanya konstitusi tersebut, negara Jepang yang tadinya bersifat ekspansionis-imperialis dan suka perang, kini telah berubah menjadi negara pasifis yang selalu menekankan solusi damai diluar kekerasan dan militerisme. Kelemahan Jepang dalam kewenangan militer untuk berdiri sendiri juga dibatasi dengan adanya pasal 9 konstitusi 1947,

*“Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes...In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized”.*

Prinsip dasar mengenai pasal 9 konstitusi 1947 tersebut membatasi wewenang kepada Jepang yang hanya memiliki kekuatan minimum untuk keperluan mempertahankan diri saja, yang akibatnya menjadikan keamanan dan survival Jepang sangatlah tergantung dari jaminan *security* AS.<sup>5</sup>

Sebagaimana diketahui, perlahan-lahan kekuatan militer AS sudah mulai menurun, karena AS sedang memiliki permasalahan ekonomi, baik dalam maupun luar negerinya yang harus dihadapi dan cenderung lebih memikirkan untuk

---

<sup>5</sup> Abdul Irsan, *Budaya & Perilaku Politik Jepang Di Asia*, Grafindo, Jakarta, 2007, hal 152

memperbaiki sistem ekonominya yang sedang labil tersebut terlebih dahulu. Salah satu permasalahan perekonomian luar negerinya yaitu murahnya nilai tukar Yuan pada Dollar, sehingga produk AS menjadi kalah bersaing dengan China. Ekonomi AS mengalami defisit perdagangan besar dengan China. Defisit perdagangan sendiri dapat diartikan sebagai kondisi dimana impor melebihi ekspor suatu negara. Pada tahun 2007 saja defisit perdagangan AS sudah mencapai 230 Triliun dengan China.<sup>6</sup> Tentu keadaan tersebut sangat berpengaruh bagi Jepang. Baik dalam hal politik dalam negeri, politik luar negeri serta sangat mempengaruhi kebijakan pertahanan keamanannya. Selain itu Jepang yang masih mengacu pada konstitusi setelah perang dunia II sangat tertinggal dari negara lainnya terutama China dan Korea Utara dalam bidang militer apalagi kedua negara tersebut memiliki sistem pertahanan nuklir yang dapat sewaktu-waktu mengancam Jepang.

Selain isu perimbangan kekuatan di kawasan Asia Timur, ada hal lain lagi yang menyita perhatian besar pemerintah Jepang. Isu perompakan Teluk Aden yang telah menjadi sebuah momok yang menakutkan sekaligus mengusik keamanan Internasional. Jepang bersama-sama negara lain turut aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan internasional terutama dalam hal pelayaran internasional. Untuk pertama kalinya dalam sejarah militer Jepang pasca konstitusi 1947 di bawah payung militer AS, Jepang mengirimkan Kapal Perang

---

<sup>6</sup> *Drama Defisit Perdagangan AS*, (diakses pada 30 Oktober 2009);

<http://republikbabi.com/drama-defisit-perdagangan-as>

ke Teluk Aden Somalia. Ternyata Jepang mampu berperan serta dalam menjaga stabilitas Internasional dan dibuktikannya dengan mengirim dua kapal angkatan lautnya ke Teluk Aden pada 13 Maret 2009, yang terkenal dengan keganasan Perompaknya terutama dari Somalia, negara dunia ketiga yang masih didera konflik dan perang saudara. Kedua kapal itu, yaitu Sazanami dan Samidare, akan membawa sekitar 400 personil dan penjaga pantai.<sup>7</sup> Tidak berselang waktu lama, Jepang mengirimkan dua kapal perang kembali dengan tujuan mengganti peranan dua kapal perang yang lebih dahulu dikirimnya yaitu Harusame dan Amagiri. Kedua kapal perusak tersebut, masing-masing mengangkut dua helikopter pengawas dan dua kapal cepat. Kedua kapal perang tersebut juga mengangkut 420 pelaut, termasuk pasukan komando terlatih serta delapan petugas Penjaga Pantai yang diberi wewenang menangkap perompak. Jepang juga mengirim dua pesawat pengintai P-3C untuk turut dalam misi anti-pembajakan pada bulan Mei 2009.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Dua kapal Jepang ke Somalia*, (diakses pada tanggal 15 Mei 2009);  
[http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/03/090313\\_jepang.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/03/090313_jepang.shtml)

<sup>8</sup> *Dua Kapal Perusak AL Jepang Bertolak Lakukan Misi Anti-Pembajakan di Somalia*, (diakses pada tanggal 24 Agustus 2009);  
[http://analisdaily.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=20546:dua-kapal-perusak-al-jepang-bertolak-lakukan-misi-anti-pembajakan-di-somalia&catid=18:umum&Itemid=27](http://analisdaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20546:dua-kapal-perusak-al-jepang-bertolak-lakukan-misi-anti-pembajakan-di-somalia&catid=18:umum&Itemid=27)

#### **D. Pokok Permasalahan**

Dengan melihat berbagai latar belakang yang telah diutarakan tersebut maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan yaitu :

**Mengapa pasukan militer Jepang terlibat dalam pemberantasan perompak di Teluk Aden Somalia?**

#### **E. Kerangka Dasar Teori**

##### **Konsep Kepentingan nasional**

Konsep Kepentingan Nasional sangat penting bagi setiap usaha untuk menerangkan, menjelaskan, meramalkan, atau membuat preskripsi mengenai perilaku Internasional. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta factor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan vital bagi Negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan Negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.<sup>9</sup>

Menurut Hans J. Morgenthau, seorang pendukung terkenal aliran realis dalam hubungan internasional, merupakan pendukung sistematis terhadap premis yang mengatakan bahwa strategi diplomasi harus dimotivasi oleh kepentingan nasional. Morgenthau menyamakan kepentingan nasional sebagai usaha Negara

---

<sup>9</sup> Jack C Plano, Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, terjemahan Wawan Juanda, Third Edition, Clio Press Ltd, England, 1982,p.7

untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan memelihara control suatu Negara dengan Negara lain, makna yang tersirat dalam konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup, yaitu kemampuan untuk melindungi identitas fisik, politik, dan budayanya dari gangguan Negara lain. Jika diterjemahkan dalam tujuan yang lebih spesifik maka membela atau melindungi identitas fisik sama dengan memelihara identitas wilayah suatu Negara.

Ekonomi merupakan salah satu unsur vital dalam kepentingan nasional. Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pesatnya perkembangan perindustrian di Jepang membawa pengaruh terhadap *economic wellbeing*, dimana dapat membantu meningkatkan perekonomian Jepang disamping industri-industri besar Jepang lainnya yang berujung pada kesejahteraan rakyat. Hal inilah yang dilakukan oleh Jepang dengan tetap menjaga kegiatan-kegiatan ekspor impor serta menjaga kestabilan suplai bahan bakar/minyak sebagai salah satu cara untuk menjaga perekonomiannya agar tetap stabil bahkan lebih mumpuni dalam upaya mencapai kepentingan nasionalnya.

### **Decision-Making theory (Teori Pembuatan Keputusan)**

Untuk melakukan analisis terhadap kebijakan yang diambil pemerintah Jepang dalam mengeluarkan kebijakan militer dalam konteks Internasional maka teori yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah, *decision-making theory* (teori pembuatan keputusan), khususnya *foreign policy decision-making* (teori pembuatan kebijakan luar negeri). Teori pembuatan keputusan mengidentifikasi

sejumlah besar variabel yang relevan dan mengemukakan saling keterkaitan yang mungkin ada dari berbagai variabel tersebut.

Teori pembuatan keputusan untuk menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan luar negeri. Batasan politik luar negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasionalnya yang spesifik, dituangkan dalam terminologi kepentingan nasionalnya.<sup>10</sup> Dari definisi tersebut terlihat empat unsur dalam politik luar negeri, yaitu strategi, aktor pembuat keputusan, lingkungan eksternal, dan kepentingan suatu negara. Jadi politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan, dan melindungi kepentingan negara tersebut.

Jadi politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan, dan melindungi kepentingan Negara tersebut.<sup>11</sup>

**Sedangkan William D. Coplin menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam menentukan politik luar negeri dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu :**

1. Politik Dalam Negeri
2. Kondisi Ekonomi dan Militer
3. Konteks Internasional<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Jack C Plano dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, 3<sup>rd</sup> ed. (England: Lio Press Ltd, 1982),

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 7

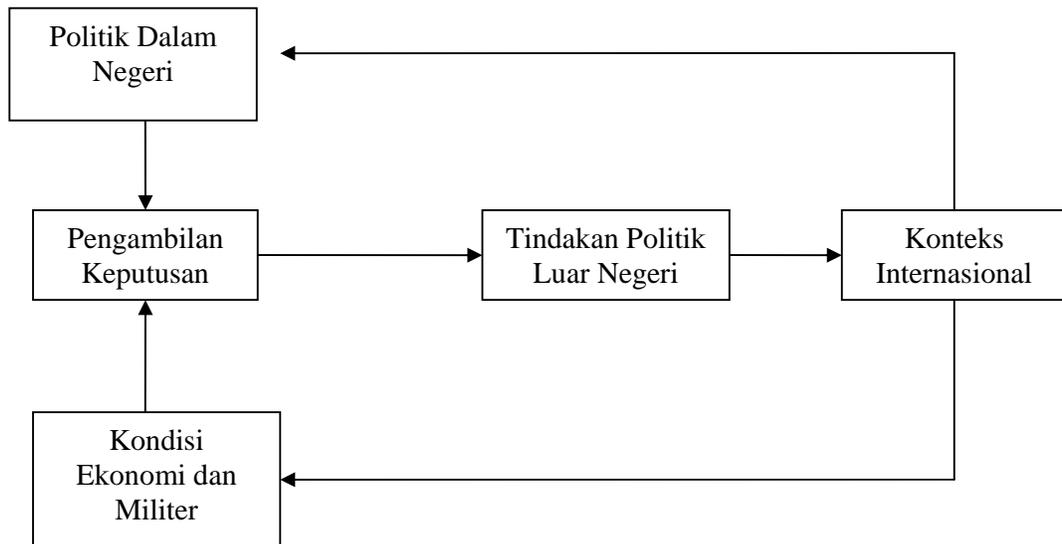
<sup>12</sup> William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal 30

Interaksi faktor-faktor itulah yang menghasilkan tindakan politik luar negeri, digambarkan dalam skema sebagai berikut

**Gambar I. 1**

**Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri**

**William D. Coplin**



Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut bisa dijelaskan mengenai faktor apa yang melatar belakangi Jepang dalam pemberantasan perompak di Teluk Aden Somalia adalah:

- A. Kondisi Politik Dalam Negeri**
- B. Kondisi Ekonomi dan Militer**
- C. Konteks Internasional**

1. Kondisi politik dalam Negeri

Menurut William D. Coplin kondisi domestik memiliki pengaruh dalam menentukan output kebijakan luar negeri suatu negara, termasuk budaya dan

sistem politik yang berjalan beserta variable-variable yang mempengaruhinya. *Domestic Politic* (situasi politik dalam negeri) termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Selain itu, pembuatan kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh situasi politik dalam negeri yang tengah dihadapi. Dimana banyak analis politik internasional berargumentasi bahwa konsekuensi-konsekuensi yang mempersatukan dari krisis eksternal sering menyebabkan para pengambil keputusan politik luar negeri, yang dihadapkan pada instabilitas di dalam negeri, menjadi agresif di luar negeri.<sup>13</sup>

Perkembangan politik dalam negeri Jepang sangat tergantung pada pemimpinnya, dalam hal ini perdana menteri di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan di negerinya. Kerap kali terjadi banyak perbedaan dalam sebuah parlemennya. Dalam hal ini Partai Liberal Demokrat (LDP) yang hampir selalu menguasai kehidupan politik di Jepang, akan selalu berhadapan dengan DPJ atau Partai Demokrat Jepang yang merupakan oposisi, yang terkadang memunculkan perbedaan pendapat yang terjadi pada sebagian kecil dari sayap kirinya, dalam hal pembuatan keputusan, baik politik dalam negeri ataupun luar negerinya. Namun sejauh ini dapat diatasi dengan baik oleh PM Taro Aso sehingga keadaan politik dalam negeri Jepang untuk saat ini relatif kondusif dan stabil.

## 2. Kondisi ekonomi dan militer

Faktor ekonomi dan militer, sangat mempengaruhi kemampuan diplomasi suatu negara, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan dalam pertahanan dan keamanan. Faktor ekonomi dan militer memainkan penting dalam

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 171

proses pembuatan kebijakan luar negeri karena berpengaruh terhadap kekuatan menekan yang harus dimiliki dalam hubungan luar negerinya. Negara-negara yang mempunyai kemampuan ekonomi dan militer yang kuat dipastikan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam hubungannya dengan negara lain.

Menurut William D. Coplin, kemampuan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan melihat GNP-nya (Gross National Product), yaitu semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun. Selain GNP, indikator ekonomi lainnya adalah GNP perkapita atau pendapatan perkapita serta dengan melihat potensi pertumbuhan ekonomi tersebut.<sup>14</sup> Jadi dapat di asumsikan bahwa, semakin besar GNP negara tersebut maka semakin makmur dan kayalah negara tersebut. Ada pun dalam hal militer, terdapat dua kondisi terhadap kekuatan militer suatu negara. GNP merupakan hal pertama, yang menunjukkan sumber daya umum yang tersedia untuk membangun dan memelihara kekuatan militer. Negara-negara yang GNP-nya tinggi pada waktu tertentu mungkin tidak kuat secara militer, karena negara tersebut memilih menggunakan kebanyakan sumberdaya mereka untuk konsumsi selain barang kekuatan militer. Akan tetapi pada umumnya, semakin tinggi GNP-nya, makin tinggi pula kemampuannya untuk menciptakan kekuatan militer, terutama untuk jangka panjang.

Kondisi yang kedua adalah kesediaan masyarakat untuk mendukung usaha-usaha militer supaya meningkatkan kekuatan militernya.<sup>15</sup> Jepang yang sedang mengalami perkembangan politik yang cukup signifikan merasa dituntut

---

<sup>14</sup> *Op.Cit*, hal 151

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 126

untuk menjaga stabilitas Internasional. Karena Perompak merupakan ancaman bagi masyarakat internasional, termasuk Jepang. Dimana Teluk Aden salah satu daerah pelayaran tersibuk di dunia, sebagaimana kita ketahui bahwa jalur perdagangan Teluk Aden merupakan jalur penting yang dilalui dalam hal pengangkutan maupun pengiriman barang. Demikian halnya dengan Jepang yang memiliki banyak kapal dagangnya dan setiap saat melewati jalur perairan tersebut untuk melakukan kegiatan ekonominya dalam hal menjaga suplay akan bahan bakar minyak dan gas serta kegiatan ekspor aneka industrinya dari dan untuk Timur –Tengah juga Eropa. Serta dalam hal militer Jepang merasa dituntut untuk membuktikan dari fungsi dan eksistensi dari pertahanan militernya kepada dunia internasional serta proses untuk menjadi negara normal karena ditunjang dengan semakin cepatnya pertumbuhan ekonomi tersebut. Kenyataan di ataslah yang menurut hemat penulis mempengaruhi dibuatnya kebijakan Jepang dalam pengiriman kapal perang ke perairan Teluk Aden di Somalia.

### 3. Konteks Internasional

Faktor ketiga adalah konteks internasional, yang berupa situasi internasional dimana suatu negara melaksanakan politik luar negerinya yang ditujukan dalam mempengaruhi negara-negara lain. Hubungan politik dengan negara-negara lain dalam lingkungannya sangat berperan dalam keputusan politik suatu negara. Konteks Internasional memiliki peranan penting dalam menentukan politik luar negeri. Konteks internasional akan memungkinkan kita untuk menentukan politik

luar negeri suatu negara hanya secara parsial, karena harus didukung dengan menelaah proses-proses politik luar negeri negara tersebut.<sup>16</sup>

Dalam memahami kasus politik luar negeri, masalah awal yang harus lebih dahulu di jelaskan adalah unsur kepentingan nasional dan kekuatan nasional suatu negara yang bersangkutan. Dengan kata lain dapat dianggap bahwa politik luar negeri adalah penyeimbangan atau pemenuhan selisih antara kuantitas dan kualitas kepentingan nasional dan kekuatan nasional.<sup>17</sup> Jika kita hubungkan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, yaitu pengiriman kapal perang Jepang ke Teluk Aden di Somalia. Ini sangat berkaitan erat pada kondisi yang ada di Jepang yaitu, konteks internasional yang turut andil dalam keputusan pemerintah.

Perompakan yang terjadi di Teluk Aden Somalia menjadi masalah besar bagi negara-negara yang menggunakan jalur tersebut sebagai jalur perdagangan mereka dan juga merupakan masalah internasional yang memang merugikan banyak pihak. Untuk itu PBB sebagai organisasi internasional melakukan sebuah upaya untuk menyelesaikannya. Melalui Dewan keamanan PBB, yang telah mengeluarkan resolusi 1838 yang berisikan tentang kewenangan kepada semua negara yang berkepentingan dengan keamanan kegiatan maritim untuk mengambil bagian secara aktif dalam perang melawan perompakan di lepas pantai laut luas Somalia, khususnya dengan mengerahkan kapal angkatan laut dan pesawat militer. Dewan Keamanan PBB juga mengeluarkan beberapa resolusi, diantaranya

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 168

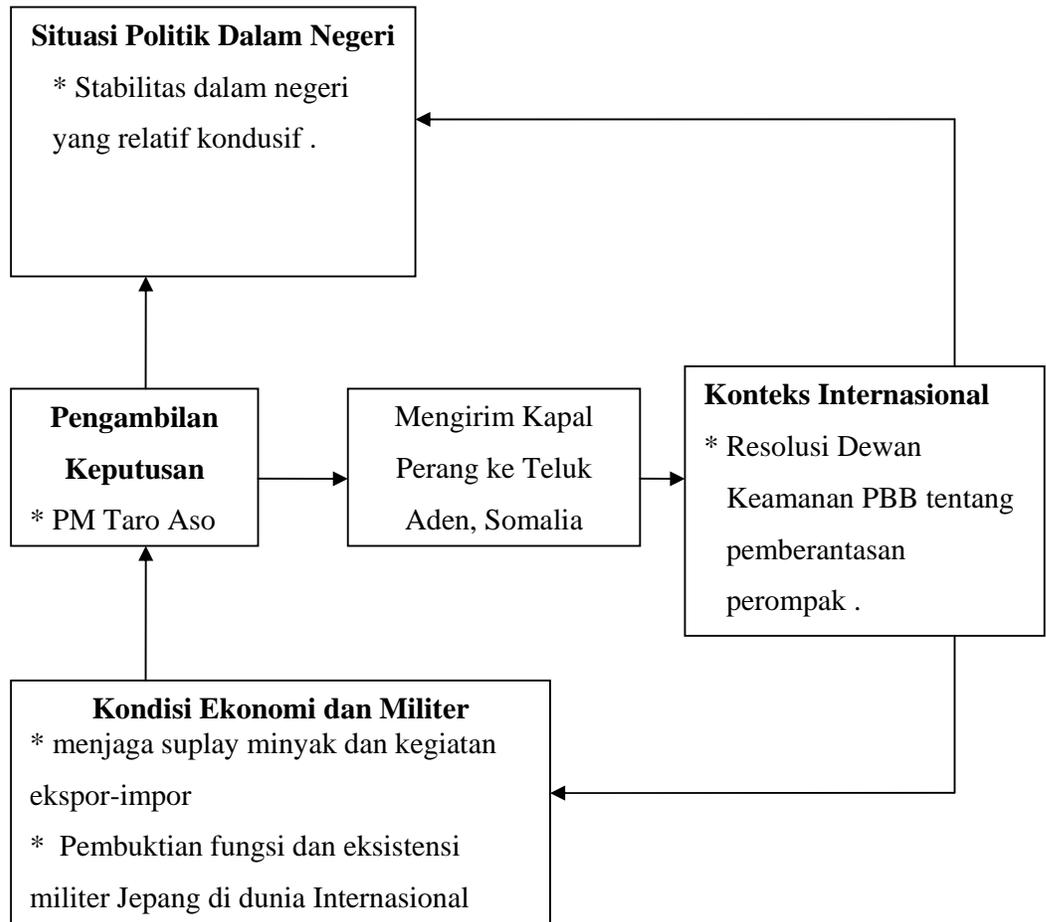
<sup>17</sup> Tulus Warsito, *Teori-Teori Politik Luar Negeri: Relevansi dan Keterbatasannya*, dalam skripsi Rulia Rahmi, *Kinerja Perusahaan Asing Di Indonesia*, HI FISIPOL UMY, Yogyakarta, 2006, hal 13.

1844, 1846, 1851 serta beberapa resolusi yang intinya untuk mengatasi masalah perompakan di Somalia tersebut. Itulah beberapa alasan yang menguatkan dan meyakinkan pemerintah Jepang dalam mengambil kebijakan luar negerinya.

Dari variabel-variabel yang telah dijelaskan diatas tersebut, sangat memengaruhi perkembangan suatu negara termasuk Jepang.

**Gambar 1.2**

**Variabel-Variabel yang Menjelaskan Kondisi Ekonomi dan Militer**



Dengan demikian, kondisi ekonomi dan militer tersebut yang menjadi bahan pertimbangan Jepang dalam pengambilan kebijakan untuk mengirimkan kapal perangnya ke Teluk Aden, Somalia.

## **F. Hipotesa**

Dengan meruntut pada permasalahan yang telah dikemukakan di atas dan menggunakan kerangka pemikiran teoritis yang dipakai, maka hipotesa yang dirumuskan dalam penulisan ini adalah bahwasanya keterlibatan Jepang dalam pemberantasan perompak di Teluk Aden, Somalia yaitu karena :

1. Faktor ekonomi, yaitu yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan minyak atau bahan bakar dan menjaga pasar bisnis Jepang dengan tujuan ekspor-impornya
2. Faktor militer, yang dilatar belakangi oleh pembuktian fungsi dan atau eksistensi militer Jepang pada dunia internasional

## **G. Jangkauan Penelitian**

Untuk mempermudah melaksanakan analisa, maka penulis memberikan batasan jangkauan dalam penulisan hanya dari segi politik, ekonomi dan konteks internasional dari tahun 2008 hingga sekarang, terutama saat terjadinya perompakan yang dilakukan oleh warga negara Somalia dan Jepang telah mengirim dua kapal perangnya ke perairan Somalia. Tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan penelitian dari tahun-tahun sebelumnya maupun sesudahnya.

## **H. Metode Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data guna memahami serta menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini, penulis melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber. Beberapa sumber yang digunakan adalah berasal dari: buku-buku, website, surat

kabar, dan majalah serta artikel. Dari beberapa sumber itulah penulis dapat mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai bahan acuan dalam menjelaskan permasalahan ini.

## **I. Sistematika Penulisan**

**BAB I**, merupakan pertanggungjawaban metodologis penulisan ini, yang meliputi alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data dan juga sistematika penulisan.

**BAB II**, dalam bab ini lebih difokuskan terhadap sejarah keadaan ekonomi dan militer Jepang yang dimulai saat Perang Dunia II dan keadaan Jepang pasca Perang Dunia II serta peranan atau keterlibatan Jepang dalam politik global

**BAB III**, dalam bab ini penulis berkeinginan untuk mengenal lebih tentang negara Somalia, bagaimana politik dan perekonomian negara yang termasuk dalam bagian Afrika Utara itu. tidak itu saja, dalam bab ini juga akan dibahas tentang Teluk Aden beserta posisi, karakteristik dan peranan Teluk Aden di dalam jalur pelayaran internasional

**BAB IV**, dalam bab ini akan dibahas latar belakang dikeluarkannya kebijakan, yaitu faktor ekonomi dan militer.

**BAB V**, merupakan kesimpulan dari seluruh isi materi penulisan ini yang mana merupakan rangkuman dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.